



FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

MASTER

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT : Gedung Nusantara I Lantai 21 Ruang 21.25

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270

☎ 021 - 5755898, 5755858 Fax 021 - 5755859

A

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010

Disampaikan oleh :

MUHAMMAD TONAS, SE

Anggota No.A-05

Pada

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 14 Agustus 2009

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI DPR-RI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010**

Disampaikan oleh :
Muhammad Tonas, SE. – Anggota No.A-05

*Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yth. Pimpinan Sidang;
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta staf;
Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan ;
Para hadirin, hadirat yang kami muliakan.**

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi ini, perkenankan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) mengucapkan dirgahayu kemerdekaan RI yang ke 64 tahun, serta mengajak seluruh hadirin untuk menghaturkan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia maupun kita dalam menjalankan tugas konstitusional yang diamanahkan oleh rakyat Indonesia sebagai wakilnya di DPR.

Pada tanggal 3 Agustus 2009, kita telah sama-sama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI serta keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2009 nanti, Rakyat dan Bangsa Indonesia merayakan dirgahayu kemerdekaannya yang ke enampuluh empat. Usia enampuluh empat tahun merupakan rentang waktu yang cukup panjang bagi perjalanan sebuah bangsa untuk mewujudkan cita negara dalam menyejahterakan rakyatnya, dan juga bukanlah waktu yang pendek untuk menelaah kemajuan dan kekurangan dari perjalananan pemerintahan suatu bangsa.

**Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan,
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta staf,**

Fraksi BPD menyadari bahwa tahun 2009 ini masih merupakan tahun yang sarat dengan tantangan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya potensi krisis financial global, yang berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi dan politik di negara kita tercinta ini. Selain itu masalah keamanan dan terorisme yang masih saja mengganggu.

Tantangan yang di hadapi pada tahun 2009, tersebut bagi Fraksi BPD insya Allah dapat kita lewati bersama untuk kemaslahatan rakyat. Fraksi BPD mendukung kebijakan pemerintah tentang stimulus fiskal sebagai sebuah kebijakan *countercyclical* yang diberlakukan di dalam mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mendorong tumbuhnya sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap dampak dari PHK. Pembangunan infrstruktur padat karya.

Fraksi BPD dapat memahami tema "*Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat*" dalam RKP 2010 yang ditetapkan Pemerintah. Karena itu RAPBN 2010 disusun dengan mengacu

BKF
Bappenas
SDM

pada hasil kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010. RKP tahun 2010 yang disusun dengan tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang. Penataan dilakukan dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dan peningkatan daya saing perekonomian. Dalam RKP Tahun 2010 yang disampaikan oleh Presiden terdapat 5 agenda yaitu :

1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
3. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.
4. Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 beserta Nota Keuangannya, maka sebelum dilakukan pembahasan dalam panitia anggaran, perkenankan kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi BPD sebagai berikut :

1. Fraksi BPD memahami pandangan pemerintah atas pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebesar 5%, laju inflasi 5%, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata sebesar 6,5%, nilai kurs Rp. 10.000 per dolar, harga minyak mentah US \$ 60 per barrel, serta *lifting* minyak 965 ribu barrel per hari.

Asumsi dasar ekonomi yang di ajukan oleh pemerintah ini menurut hemat kami masih bisa ditingkatkan lagi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, suku bungan SBI 3 bulan rata-rata 6,5%, nilai kurs Rp. 10.000 per dolar dan harga minyak US\$ 70 per barrel, *lifting* minyak masih bisa ditingkatkan menjadi 968 ribu barrel per hari, tentu hal ini bisa di lakukan bila pemerintah betul-betul serius bekerja keras dan fokus seperti 5 agenda RKP 2010 dan juga memperhatikan perkembangan ekonomi kawasan dan ekonomi dunia yang belum stabil dan resiko terjadinya pertumbuhan asumsi makro tentu tetap kita harus waspada dan antisipatif terhadap hal tersebut.

BKF
BI
Bappenas
SD I
Dep ESDM
BP Migas
DANBP

2. Dari penerimaan *lifting* minyak sebesar 965 ribu barrel perhari BPD berpendapat perlu di lakukan audit secara menyeluruh pada setiap KPS-KPS dan pemerintah juga segera mengeluarkan PP menyangkut item-item yang menjadi komponen biaya dalam *cost recovery*.

BKF
DANBP
Dep ESDM
BP Migas
SD I

3. Penerimaan Pendapatan Negara

Postur RAPBN 2010 yang menyangkut pendapatan negara dan hibah yang diperkirakan sebesar Rp. 911,5 triliun, penerimaan perpajakan diperkirakan akan mencapai Rp. 729,2 triliun. Sebenarnya menurut Fraksi BPD, penerimaan negara dari pajak ini masih bisa ditingkatkan

DJP
DJBC
BKF
SD II

jumlahnya melalui langkah kebijakan diantaranya: intensifikasi, ekstensifikasi perpajakan.

Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dalam tahun 2010 yang diperkirakan akan mencapai Rp 180,9 triliun. Sebenarnya PNPB masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan lebih besar jumlahnya dengan cara, diantaranya:

- (a) optimalisasi produksi minyak dan gas;
- (b) pengendalian *cost recovery* melalui:
 - (i) evaluasi komponen biaya produksi;
 - (ii) evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS;
 - (iii) amandemen kontrak-kontrak kerja sama Pemerintah dengan kontraktor migas;
- (c) mengoptimalkan sumber-sumber PNPB, khususnya dari sektor pertambangan;
- (d) peningkatan deviden dari BUMN.
- (e) Memungut cukai dari industri kelapa sawit dan karet.

4. Fraksi BPD juga melihat terjadinya peningkatan anggaran belanja pusat yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2010 sebesar Rp. 699,7 triliun. Fraksi BPD memandang perlunya efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat. Pos-pos pengeluaran yang tidak perlu hendaknya di pangkas sehingga tercipta anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Seiring dengan ini, Fraksi kami mengharapkan defisit anggaran yang diasumsikan dalam R-APBN 2009 sebesar Rp. 98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB) dapat

DepESDM
BPMigas
DJP.
BKF
Kemendag
BUMN
DA-PNBF
SD II

semakin ditekan dan diperkecil dengan menjalankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran negara serta optimalisasi penghasilan negara. FBPD berharap kita bisa melaksanakan kebijakan anggaran tanpa defisit. Seberapa besar penghasilan dan pendapatan negara, sebesar itulah anggaran belanja negara dirancang. Hal ini kami yakini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melepaskan ketergantungan kita kepada hutang, baik yang diperoleh di dalam negeri, terlebih hutang yang kita peroleh dari luar negeri.

Bappenas
DA I, II, III
DJPU
BKF
SD III

5. Fraksi BPD mendesak agar kebijakan tentang energi gas hendaknya dijadikan prioritas utama dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri minimal 50% dari jumlah produksi gas nasional.

Untuk menghemat subsidi maka kami meminta pemerintah khususnya PLN untuk menggunakan bahan baku gas agar subsidi bisa ditekan sekecil mungkin, tentu hal ini bisa dilakukan didalam membuat Undang-undang APBN 2010 yang sifatnya Leg Specialis.

DepESDN
BKF
DA PNBP
PT. PLN
SD IV

6. Fraksi BPD menghargai pengalokasian anggaran pendidikan dalam RAPBN 2010 sebesar Rp. 51,8 triliun. Fraksi BPD mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan standarisasi pendidikan seperti yang selama ini dilakukan Pemerintah dengan Ujian Akhir Nasional. Tetapi juga perlu di lakukan upaya sistematis pengelolaan pendidikan nasional agar mutu pendidikan nasional lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Fraksi BPD juga

Bappenas
Depdiknas
Dep Ag
DA II
SD III

mempertanyakan banyaknya keluhan di masyarakat tentang masih banyaknya pembiayaan yang harus ditanggung orangtua yang mau menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang belum menerima buku-buku sekolah.

7. Fraksi BPD menghargai kenaikan anggaran Departemen Pertahanan, namun Fraksi BPD mengharapkan Pemerintah lebih memperhatikan prioritas dan keselamatan personil TNI/Polri. Tentang keamanan Negara ^{BPD} mengharapkan Pemerintah lebih serius menjaga keamanan Negara dari gangguan maupun rongrongan terorisme.

Bappenas
Dephan
DA III
SD III

8. Transfer ke Daerah.
Sesuai dengan arah kebijakan desentralisasi fiscal tahun anggaran 2010, maka Fraksi BPD mendesak kepada pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

Dana Bagi Hasil

Dalam hubungannya dengan Dana Bagi Hasil, pemerintah hendaknya memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh terutama menyangkut *waktu pembayarannya*,

DJPK
Depdag
Bappenas
BKF
SD IV

Dana Alokasi Umum

1. Diharapkan adanya kenaikan dana alokasi umum sebesar I (satu) persen dari tahun anggaran 2009, yaitu naik menjadi sebesar 27 persen pada tahun 2010 dari 26 persen tahun 2009. Pertimbangannya adalah, karena dana DAU merupakan tindak

lanjut dari pidato Presiden yang menghendaki adanya kenaikan gaji pegawai negeri daerah, pemberian gaji ke-13, dan pemberian tunjangan profesi. *2 bulan 5%* *meny Penun- a PRes Bnu*.

2. Dana Alokasi Umum tidak bisa dikurangi untuk biaya-biaya : subsidi Pajak, subsidi BBM, subsidi Listrik, Subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi Benih, subsidi Kredit Program, dan Remunerasi BI.
3. Dana Alokasi Umum untuk daerah pemekaran hendaknya diberikan penuh, guna untuk memenuhi gaji pegawai di daerah, pemekaran tersebut. *P- bgn* *insur 45*
4. Fraksi BPD menolak keras diberlakukannya kebijakan NON HOLD HARMLESS secara penuh, karena sangat memukul ekonomi di daerah *penghasil*. Bahkan sejak diberlakukannya kebijakan *non hold harmless* tersebut, infrastruktur jalan banyak yang rusak, kemudian listrik semakin langka, bahkan sekarang listrik digilir-mati-12 jam dalam sehari.
5. Ketentuan formulasi dana alokasi umum hendaknya memperhatikan rasa keadilan.

Dana Alokasi Khusus

Ketentuan mengenai formulasi dana alokasi khusus hendaknya memperhatikan rasa keadilan.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan atas berbagai pemikiran tersebut di atas, dengan ucapan ***Bismillahirrahmanirrahim***, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setuju

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 14 Agustus 2009

PIMPINAN
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

DPR-RI
Sekretaris,

Ketua,

dto.



dto.

JAMALUDDIN KARIM, SH. RAPIUDDIN HAMARUNG